

**STRATEGI PERDAGANGAN INDONESIA MELALUI SKEMA
ARISE+ DALAM RANGKA PERCEPATAN EKSPOR-IMPOR
INDONESIA DENGAN UNI EROPA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun Oleh :

BILL ROMBE PABIDANG

E061201067

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN JUDUL

**STRATEGI PERDAGANGAN INDONESIA MELALUI SKEMA
ARISE+ DALAM RANGKA PERCEPATAN EKSPOR-IMPOR
INDONESIA DENGAN UNI EROPA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin*

Disusun dan diajukan oleh :

BILL ROMBE PABIDANG

E061201067

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI PERDAGANGAN INDONESIA MELALUI SKEMA
ARISE+ DALAM PERCEPATAN EKSPOR-IMPOR INDONESIA
DENGAN UNI EROPA

N A M A : BILL ROMBE PABIDANG

N I M : E061201067

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 31 Juli 2024



Mengetahui :

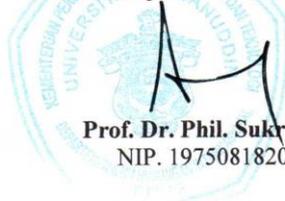
Pembimbing I,


Agussalim, S.IP. MIRAP
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,


Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA
NIP. 198910062024062001

Mengesahkan :
Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI PERDAGANGAN INDONESIA MELALUI SKEMA
ARISE+ DALAM PERCEPATAN EKSPOR-IMPOR INDONESIA
DENGAN UNI EROPA

N A M A : BILL ROMBE PABIDANG

N I M : E061201067

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 26 Juni 2024.

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

3. Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bill Rombe Pabidang
NIM : E061201067
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul :

**“Strategi Perdagangan Indonesia Melalui Skema ARISE+ dalam
Rangka Percepatan Ekspor-Impor Indonesia dengan Uni Eropa”**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 1 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Bill Rombe Pabidang)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Hasamuddin, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bill Rombe Pabidang
NIM : E061201067
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenjang : S1
Jenis Karya : Skripsi

menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

“Strategi Perdagangan Indonesia Melalui Skema ARISE+ dalam Rangka Percepatan Ekspor-Import Indonesia dengan Uni Eropa”

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 1 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Bill Rombe Pabidang)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan YME, Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan karunia serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Strategi Perdagangan Indonesia Melalui Skema ARISE+ dalam Rangka Percepatan Ekspor-Impor Indonesia dengan Uni Eropa**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua saya, Ayah (Petrus Rombe) dan Ibu (Delsy Uttung), yang selalu memberikan dukungan moral, spiritual, serta doa yang tiada henti. Tanpa cinta dan pengorbanan mereka, saya tidak akan bisa mencapai titik ini.
2. Pak Agussalim, selaku dosen pembimbing pertama, yang dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Kak Atika Puspita Marzaman, selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Seluruh dosen dan staf pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama masa studi saya.

Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Makassar, 29 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini menelaah strategi perdagangan Indonesia dalam mempercepat aktivitas ekspor-impor dengan Uni Eropa melalui skema ARISE+ Indonesia, sebuah program hibah dari Uni Eropa yang bertujuan memperkuat integrasi ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, khususnya dengan memperhatikan regulasi pasar Uni Eropa. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi implementasi dan dampak skema ARISE+ terhadap perdagangan bilateral, khususnya pada komoditas Ikan Tuna dan Kelapa Sawit yang menghadapi tantangan signifikan di pasar Uni Eropa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ARISE+ Indonesia berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan efisiensi perdagangan melalui harmonisasi standar, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta mengatasi hambatan non-tarif utama bagi ekspor kedua komoditas tersebut. Dukungan teknis dan regulasi yang diperkuat antara Indonesia dan Uni Eropa telah menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih kondusif dan kompetitif. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memperkuat kapasitas ekspor-impor, dan menyarankan perlunya penguatan strategi perdagangan melalui program hibah serupa untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Uni Eropa.

Kata Kunci: ARISE+ Indonesia, strategi perdagangan, ekspor-impor, Uni Eropa, hambatan non-tarif, Ikan Tuna, Kelapa Sawit, dukungan teknis, program hibah.

ABSTRACT

This thesis examines Indonesia's trade strategy to accelerate export-import activities with the European Union through the ARISE+ Indonesia scheme, a grant program from the European Union aimed at strengthening economic integration and enhancing Indonesia's competitiveness in the global market, particularly by addressing EU market regulations. Using qualitative descriptive methods and a case study approach, this research explores the implementation and impact of the ARISE+ scheme on bilateral trade, particularly focusing on Tuna and Palm Oil commodities that face significant challenges in the EU market.

The research findings indicate that ARISE+ Indonesia acts as a catalyst in improving trade efficiency through standard harmonization, institutional capacity building, and the utilization of information technology, as well as addressing key non-tariff barriers for the export of these two commodities. Enhanced technical and regulatory support between Indonesia and the European Union has created a more conducive and competitive trade environment. This study emphasizes the importance of government policy support and collaboration between the public and private sectors to strengthen export-import capacity, and suggests the need for strengthening trade strategies through similar grant programs to expand market access and enhance the competitiveness of Indonesian products in the European market.

Keywords: *ARISE+ Indonesia, trade strategy, export-import, European Union, non-tariff barriers, Tuna, Palm Oil, technical support, grant programs.*

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	13
1. Interdependensi.....	13
2. Bantuan Luar Negeri.....	16
3. Perdagangan Internasional	19
F. Metode Penelitian.....	26
1. Tipe Penelitian	26
2. Teknik Pengumpulan Data	26

3. Jenis dan Sumber Data.....	26
4. Teknik Analisis Data.....	27
5. Metode Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Konsep Interdependensi	28
B. Konsep Bantuan Luar Negeri (<i>Foreign Aid</i>)	33
C. Konsep Perdagangan Internasional (<i>International Trade</i>)	37
1. Ekspor dan Impor	40
2. Teori-Teori Perdagangan Internasional.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM.....	50
A. Program ARISE+ dalam Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa	50
B. Kondisi Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia - Uni Eropa	54
C. Hambatan Perdagangan Kelapa Sawit antara Indonesia dan Uni Eropa....	60
1. <i>Renewable Energy Directive II</i> (RED II).....	61
2. <i>European Union Deforestation Free Regulation</i> (EUDR).....	65
D. Kondisi Perdagangan Ikan Tuna Indonesia - Uni Eropa	67
E. Hambatan Perdagangan Ikan Tuna antara Indonesia dan Uni Eropa.....	72
1. Hambatan Tarif.....	72
2. Hambatan Non-Tarif.....	73
BAB IV PEMBAHASAN	78
A. Strategi Perdagangan Indonesia melalui Skema ARISE+ dalam Rangka Percepatan Ekspor-Impor Indonesia-Uni Eropa	78
1. Komoditas Ikan Tuna.....	82
2. Komoditas Kelapa Sawit.....	91
B. Peluang dan Hambatan Strategi Perdagangan Indonesia melalui skema ARISE+	97
1. Peluang.....	97
2. Hambatan	99

BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107

DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual	25
Grafik 3. 1 Volume dan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia (2013-2023).....	56
Grafik 3. 2 Harga Minyak Kelapa Sawit di Pasar Global Periode 2005-2023	58
Grafik 3. 3 10 Negara Tujuan Utama Ekspor Minyak Sawit tahun 2023	59
Grafik 3. 4 Grafik RCA Tuna Indonesia di Pasar Uni Eropa 2003-2018	69
Grafik 3. 5 Volume Ekspor Ikan Tuna Indonesia	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang aktif dalam perdagangan internasional, Indonesia telah membuka peluang bagi kerjasama ekonomi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kedaulatan bangsa. Sebagai acuan, kinerja ekonomi Indonesia telah menunjukkan kestabilannya selama dua dekade terakhir, terutama setelah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 (Basri, 2015). Meskipun menghadapi dua situasi ekonomi global yang sulit pada tahun 2008-2009 (Krisis Keuangan Global) dan 2013-2014 (Tantrum Pasar Keuangan), ekonomi Indonesia dianggap mampu bertahan dan terus berkembang, ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada tahun 2019 (The World Bank, 2019).

Uni Eropa adalah salah satu dari beberapa mitra utama Indonesia dalam bidang kerjasama ekonomi. Hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa telah meliputi berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa dilakukan melalui berbagai forum dan perjanjian bilateral maupun multilateral. Sejak lama, Uni Eropa merupakan salah satu dari pasar utama bagi produk ekspor Indonesia, sementara Indonesia juga menerima investasi serta berbagai program bantuan dari Uni Eropa dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi dan sosial.

Uni Eropa menjalankan sebuah sistem pasar tunggal yang berkekuatan 27 negara yang bersatu dan diperkuat oleh kesepakatan *European Economic Area* (EEA) yang membentuk pasar tunggal Eropa. Ekonomi Uni Eropa adalah yang

kedua terbesar di dunia baik dalam nilai nominal maupun berdasarkan *purchasing power parity* (PPP). Pada tahun 1992, ditandatangani perjanjian EEA bagi negara-negara yang tergabung dalam *European Free Trade Association* (EFTA). Pada saat perjanjian tersebut ditetapkan, terdapat partisipasi 31 negara dalam EEA, melibatkan sekitar 372 juta penduduk, dan mencapai total pendapatan sekitar 7,5 triliun dolar Amerika dalam tahun pertama perjanjian berlaku (Sari, 2021).

Akan tetapi, meskipun Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN dan mitra dagang utama bagi Uni Eropa, dalam beberapa tahun terakhir hubungan antara kedua belah pihak kerap memanas, terlebih khususnya dalam bidang ekspor dan impor. Terdapat kompleksitas dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa karena adanya perbedaan peraturan, standar, dan masalah akses pasar. Kesenjangan tersebut dapat menghambat kelancaran arus barang antar kedua wilayah. Salah satu topik hambatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa selama beberapa tahun terakhir adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas yang penting bagi perekonomian Indonesia, menyumbang sebagian besar ekspor negara tersebut dan memberikan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Namun, Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur penggunaan dan impor minyak kelapa sawit dengan alasan lingkungan, khususnya terkait deforestasi, perubahan iklim, serta isu-isu terkait hak asasi manusia.

Pada tanggal 4 April 2017, parlemen Uni Eropa menerbitkan sebuah resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan. Resolusi yang dinamakan *Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* itu diajukan berdasarkan tuduhan

bahwa pengembangan industri kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan iklim. Dalam resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia itu, menunjukkan tindakan diskriminatif terhadap negara penghasil minyak kelapa sawit dan berlawanan dengan posisi UE sebagai champion of open, rules based free, and fair trade (Suwarno, 2019) Uni Eropa juga kemudian merevisi kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) dengan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang mendiskualifikasi minyak kelapa sawit dari bahan baku biofuel di Eropa. RED berisi perjanjian tentang penggantian bahan baku fosil dengan biofuel untuk target perbaikan iklim di 2020 hingga 2030, sedangkan RED II menambahkan kriteria kepada biofuel yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Secara bertahap minyak kelapa sawit mulai dikurangi pemakaiannya dalam bahan baku biofuel pada 2019 hingga 0% pada 2030. Alasannya adalah minyak kelapa sawit tidak memenuhi kriteria bahan baku biofuel Eropa yang ditargetkan bebas penggundulan hutan (deforestasi), menimbulkan kadar karbon tinggi, dan bukan merupakan daerah bernilai alam tinggi (penuh biodiversitas). Alasan-alasan tersebut dirasa telah cukup bagi UE untuk mendiskualifikasi minyak kelapa sawit dari bahan baku biofuel yang mereka gunakan.

Puncak hambatan kelapa sawit masuk pasar Uni Eropa terjadi pada pertengahan 2023 ketika UE mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan baru perdagangan yakni kebijakan anti-deforestasi yang dikenal dengan *European Union Deforestation-Free Regulation* atau kebijakan EUDR (PASPI Monitor, 2023). Kebijakan tersebut disetujui dan diberlakukan oleh Parlemen Uni Eropa pada tanggal 29 Juni 2023 yang ditujukan pada sejumlah komoditas yang mereka sebut

sebagai *forest risk commodity* termasuk didalamnya minyak sawit dan produk turunannya. Menurut keyakinan EU, kebijakan EUDR tersebut ditujukan untuk menghentikan atau menghilangkan perdagangan komoditas/produk yang proses produksinya terkait deforestasi maupun degradasi hutan, sehingga diharapkan akan menekan atau bahkan menghentikan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan global.

Kebijakan yang dilakukan oleh UE mendapatkan kritikan keras dari negara-negara produsen kelapa sawit, khususnya Indonesia. Apa yang dilakukan oleh UE merupakan langkah yang akan mampu mengurangi pasar minyak kelapa sawit sehingga menjadi hambatan bagi produksi dan perdagangan minyak kelapa sawit. Indonesia tentu akan merasa khawatir kehilangan pasar komoditasnya yang sangat mengandalkan kelapa sawit sebagai sumber devisa terbesar negaranya. Namun parahnya Eropa sendiri merupakan target ekspor terbesar kedua kelapa sawit Indonesia setelah India.

Tidak hanya di sektor perkebunan, produk perikanan Indonesia juga mengalami hambatan masuk pasar Uni Eropa. Perdagangan ekspor ikan tuna Indonesia masih dihadapkan pada banyaknya kasus penolakan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Hal ini berdampak pada kerugian ekonomi yang dialami baik oleh pengusaha maupun pemerintah. Salah satu tantangan yang signifikan adalah tingginya bea masuk yang dikenakan oleh UE terhadap produk tuna Indonesia, sehingga menghambat kemampuan Indonesia untuk bersaing secara efektif di pasar Eropa. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga memberlakukan persyaratan ketat lainnya dalam bentuk non tarif. Misalnya ikan

dan produk perikanan harus memenuhi keamanan dan kesehatan pangan, persyaratan hewan, kemasan produk, dan persyaratan label dan aturan pemasaran di bawah kebijakan *EU Common Fisheries Policy* (Khaliqi et al., 2019). Selain itu, beberapa produk juga harus mematuhi peraturan lingkungan mengenai *illegal fishing* dan perlindungan spesies yang terancam punah. Langkah-langkah ini berkisar dari persyaratan sertifikasi, marking and labelling untuk alasan *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), pembatasan geografis, dan lain-lain. Dengan kata lain, seluruh rantai pasokan ikan dan produk perikanan dipengaruhi oleh peraturan Uni Eropa mulai dari penangkapan (*catching*), budidaya (*cultivation*), pendaratan (*landing*), pengolahan (*processing*), pengangkutan (*transporting*), mengimpor (*importing*), pemasaran (*marketing*), distribusi (*distribution*) dan penjualan (*selling*) di pasar Eropa.

Merespon hal tersebut, Indonesia memberlakukan kebijakan retaliasi terhadap Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap produk-produk Indonesia. Indonesia menaikkan tarif impor untuk produk-produk dari UE, seperti susu, keju, dan minuman anggur. Tidak hanya itu, pada tahun 2020 Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan untuk memberlakukan larangan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa (Staff, 2019). Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia merupakan tanggapan langsung terhadap kebijakan tarif anti-subsidi yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap biodiesel Indonesia. Tindakan balasan ini diambil oleh Indonesia sebagai langkah untuk melindungi industri dalam negeri serta menjaga agar pangsa pasar tetap terjaga.

Nikel tidak asing dalam kehidupan kita karena kandungannya dapat ditemukan mulai dari peralatan dapur seperti sendok dan garpu, hingga baterai ponsel pintar, komponen pesawat, dan berbagai perangkat elektronik lainnya, kandungan nikel hadir di mana-mana. Sebagai logam yang sering disebut sebagai "*mother of industry*", nikel memiliki peran vital dalam mendukung berbagai sektor industri, termasuk industri otomotif (Prameswara et al., 2023). Alasan utama Indonesia memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel adalah ingin mendorong hilirisasi industri, yaitu proses pengolahan bahan baku menjadi produk akhir. Dengan melarang ekspor bijih nikel, Indonesia ingin mendorong industri pengolahan nikel di dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global (Cahyani, 2023). Uni Eropa, yang merupakan salah satu importir utama bijih nikel dari Indonesia, merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut. Mereka berargumen bahwa larangan ekspor tersebut melanggar aturan perdagangan internasional dan merugikan industri baja nirkarat di Uni Eropa. Larangan ekspor Indonesia juga menyebabkan kekurangan pasokan nikel di Uni Eropa sehingga meningkatkan harga nikel global (Asmarini & Munthe, 2017).

Puncaknya pada tahun 2021, Uni Eropa membawa sengketa ini ke *World Trade Organization* (WTO). Panel WTO kemudian memutuskan bahwa Indonesia memang telah melanggar aturan perdagangan internasional dengan memberlakukan larangan ekspor bijih nikel. Indonesia diberikan waktu hingga November 2023 untuk mematuhi putusan panel WTO. Jika Indonesia tidak patuh, Uni Eropa dapat menerapkan retaliasi dagang, seperti mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap

produk-produk Indonesia lainnya. Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa mereka akan mematuhi putusan panel WTO. Namun, Indonesia juga sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut (Koswaraputra & Bechtel, 2022). Sengketa nikel ini menjadi contoh bagaimana kebijakan hilirisasi industri dapat menimbulkan konflik perdagangan internasional. Di satu sisi, Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alamnya. Di sisi lain, negara-negara lain khususnya Uni Eropa yang berkepentingan dengan sumber daya alam tersebut dapat merasa dirugikan.

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Namun, hubungan ini masih diwarnai dengan berbagai permasalahan, seperti hambatan tarif dan non-tarif dan kesenjangan standar produk. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang. Untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan upaya bersama dari kedua belah pihak untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kerjasama ekonomi yang erat dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateral dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Salah satu yang media yang digunakan Indonesia dan Uni Eropa untuk merundingkan hambatan ekspor-impor yang terjadi antara kedua belah pihak adalah *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA).

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) merupakan kolaborasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan

hubungan ekonomi antara Indonesia dan UE. Kemitraan ini sangat penting karena memanfaatkan pasar ekonomi UE yang besar dan perekonomian terbuka, melengkapi kekuatan ekonomi Indonesia tanpa menimbulkan persaingan negatif di pasar Indonesia. IEU-CEPA mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi, dengan fokus pada perdagangan (ekspor dan impor), tarif komoditas, dan kinerja (permintaan dan penawaran) (Saputra, 2020). Salah satu tujuan utama IEU-CEPA adalah menghilangkan hambatan tarif, yang masih relatif tinggi di Indonesia, sehingga menghambat kemampuan Indonesia untuk menavigasi ketidakpastian perekonomian global secara efektif.

IEU-CEPA berupaya meningkatkan akses pasar dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, menarik investasi, meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas, membuka kesempatan magang dan kerja, serta meningkatkan daya saing. Perjanjian ini sangat bermanfaat bagi Indonesia karena bertujuan untuk meningkatkan PDB secara signifikan setiap tahunnya setelah perjanjian ini diselesaikan. UE merupakan mitra ekonomi yang menguntungkan bagi Indonesia karena sifat perekonomian mereka yang saling melengkapi, sehingga meminimalkan risiko persaingan langsung (Saputra, 2020). Dampak positif IEU-CEPA terhadap ekspor tekstil Indonesia menyoroti potensi manfaat kemitraan ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan perdagangan. Perundingan IEU-CEPA resmi dimulai pada 18 Juli 2016 dan sudah menyelesaikan 16 putaran hingga akhir tahun 2023. Namun, hingga kini masih menemui jalan terjal untuk mencapai kesimpulan akhir terkait penyelesaian hambatan ekspor-impor antara kedua belah pihak. Perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Uni Eropa

menjadi batu sandungan utama. Indonesia ingin meningkatkan akses pasar untuk produknya, sedangkan Uni Eropa ingin standar yang lebih tinggi dan akses pasar yang lebih luas. Kebijakan Uni Eropa seperti *European Green Deal*, CBAM, dan *Deforestation Free Product* juga menambah kompleksitas negosiasi. Mekanisme penyelesaian sengketa dan dampak ekonomi IEU-CEPA juga masih menjadi perdebatan.

Ditengah kompleksitas perundingan IEU-CEPA, pada 25 September 2019 Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui peresmian *ASEAN Regional Integration Support-Indonesia Trade Support Facility* (ARISE+ Indonesia). ARISE+ Indonesia merupakan program hibah Uni Eropa berjangka waktu lima tahun bernilai 15 juta euro sekitar Rp. 232 Miliar yang bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan daya saing ekspor dan integrasi ke dalam rantai nilai global (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019). Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya hubungan ekonomi yang berkelanjutan dengan Uni Eropa, yang akan memperkuat kemampuan Indonesia dan membuka peluang lebih besar untuk mengambil manfaat dari perjanjian perdagangan internasional dan integrasi ekonomi di tingkat regional. Program ARISE+ Indonesia tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan, tetapi juga akan melibatkan masyarakat sipil di sektor perdagangan dan investasi, terutama para perwakilan dari dunia usaha seperti pelaku bisnis sektoral, petani dan produsen skala kecil.

ARISE+ Indonesia bertujuan untuk membantu Indonesia dalam beberapa hal kunci. Pertama, program ini fokus pada meningkatkan kualitas produk bagi

UMKM dan pengusaha Indonesia agar sesuai dengan standar pasar Uni Eropa. Ini dicapai melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan dalam mendapatkan sertifikasi yang diperlukan. Selain itu, ARISE+ juga bertujuan untuk memperkuat rantai nilai di Indonesia dengan menghubungkan UMKM dengan pembeli di Uni Eropa, meningkatkan akses ke teknologi dan keuangan, serta membangun infrastruktur yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, program ini mempromosikan perdagangan berkelanjutan dengan mendorong praktik yang ramah lingkungan dan adil, seperti mengurangi emisi karbon, menggunakan bahan baku yang berkelanjutan, dan menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil. Program ARISE+ Indonesia menggabungkan berbagai upaya ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Selain memperkuat kerjasama ekonomi, program ARISE+ Indonesia juga memiliki tujuan untuk mengatasi hambatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Sejumlah produk Indonesia menghadapi kesulitan dalam masuk ke pasar Uni Eropa karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa terkait dengan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, program ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional yang diperlukan untuk ekspor ke Uni Eropa. Melalui bantuan teknis dan kapasitas yang difasilitasi oleh program ini, Indonesia dapat memperbaiki infrastruktur regulasi dan pengawasan produk, meningkatkan kualitas produk, serta memperbaiki proses produksi untuk memastikan bahwa produk-produk Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Selain itu, program ini juga membantu Indonesia dalam memahami

persyaratan teknis dan prosedur yang diperlukan untuk ekspor ke Uni Eropa, sehingga mempermudah akses pasar bagi produk-produk Indonesia.

Pasca ditandatanganinya Kerjasama ARISE+ Indonesia pada 2019, hubungan perdagangan antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia terus kokoh, meskipun terjadi gangguan besar dalam ekonomi global selama pandemi COVID-19. Total perdagangan bilateral meningkat sebesar 32 persen menjadi EUR 32,6 miliar pada tahun 2022. Meskipun Indonesia umumnya memiliki surplus perdagangan yang tinggi dengan UE, pada tahun 2022 surplusnya mencapai EUR 14,4 miliar, meningkat 63 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022, Uni Eropa menempati peringkat kelima sebagai mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia. Ekspor barang Indonesia ke Uni Eropa menyumbang sekitar 7,4% dari total ekspor globalnya, sedangkan impor barang dari Uni Eropa menyumbang sekitar 5% dari total impor barangnya dari seluruh dunia. Sementara bagi Uni Eropa, Indonesia merupakan mitra perdagangan global ke-33 dalam hal total perdagangan, menjadi sumber impor terbesar ke-28, dan menjadi tujuan ekspor ke-38 (European External Action Service, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul : **“Strategi Perdagangan Indonesia Melalui Skema ARISE+ dalam Rangka Percepatan Ekspor-Import Indonesia dengan Uni Eropa”**. Penulis ingin meneliti peran ARISE+ untuk menghilangkan hambatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Namun, penulis menyadari akan luasnya cakupan penelitian ini, oleh karena itu dibutuhkan batasan masalah. Penelitian ini akan difokuskan pada kelapa sawit dan ikan tuna. Pemilihan kedua

komoditas ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kelapa sawit dan ikan tuna adalah dua komoditas utama dalam perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Kedua, kedua komoditas ini memiliki tantangan dan hambatan ekonomi yang spesifik, termasuk masalah regulasi, standar sanitasi dan fitosanitasi, serta isu lingkungan yang menjadi perhatian utama dalam perdagangan internasional. Dengan membatasi masalah pada kedua komoditas ini, penelitian dapat lebih fokus untuk mengidentifikasi strategi perdagangan yang efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa melalui skema ARISE+.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi perdagangan Indonesia melalui ARISE+ dalam rangka percepatan ekspor-impor Indonesia ke negara-negara Uni-Eropa?
2. Bagaimana peluang dan hambatan strategi perdagangan Indonesia melalui ARISE+ dalam rangka percepatan ekspor-impor Indonesia ke negara-negara Uni-Eropa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi perdagangan perdagangan yang diterapkan oleh Indonesia melalui ARISE+ untuk meningkatkan ekspor-impor ke negara-negara Uni-Eropa.

2. Menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan strategi perdagangan melalui ARISE+ untuk meningkatkan ekspor-impor ke negara-negara Uni-Eropa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibuat untuk mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan mengenai Ilmu Hubungan Internasional.
2. Memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang strategi perdagangan Indonesia melalui skema ARISE+ dalam rangka percepatan ekspor-impor Indonesia ke negara-negara Uni-Eropa.
3. Menambah literatur dan pengetahuan akademik tentang strategi perdagangan Indonesia melalui skema ARISE+ dalam rangka percepatan ekspor-impor Indonesia ke negara-negara Uni-Eropa.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan analisis, serta mencegah terjadinya distorsi pembahasan terhadap objek penelitian dan menghindari pembahasan yang tidak relevan, penulis mencoba untuk mengusulkan sebuah kerangka konseptual sebagai pedoman dalam penelitian. Adapun konsep dan teori yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut.

1. Interdependensi

Dalam tradisi pemikiran liberalisme, kajian tentang faktor penyebab perdamaian dunia sering kali menyoroti konsep interdependensi ekonomi. Menurut beberapa pemikir liberalisme, perdamaian dipengaruhi oleh adanya

ketergantungan ekonomi yang saling terhubung antar negara. Tokoh seperti Robert Keohane, Jack Levy, Andrew Moravcsik, dan Richard Roscerance merupakan contoh tokoh yang mengemukakan pengaruh signifikan dari ketergantungan ekonomi ini dalam menciptakan perdamaian dunia.

Para pemikir dalam teori Interdependensi ekonomi sepakat bahwa keberadaan keterikatan dan ketergantungan ekonomi antar negara mampu mempromosikan perdamaian. Asumsi di balik konsep ini adalah bahwa negara-negara akan cenderung menghindari konflik dan perang karena pertimbangan mengenai biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang terkait dengan kerugian dari kehilangan manfaat yang diperoleh melalui ketergantungan ekonomi. Dengan kata lain, ketika negara-negara saling tergantung satu sama lain dan memperoleh keuntungan ekonomi dari hubungan tersebut, mereka akan memiliki insentif yang kuat untuk memelihara perdamaian (Rosecrance, 1986; Keohane & Nye, 2001). Negara-negara cenderung menghindari opsi perang atau penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik karena mereka menyadari bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan "hukuman" dari pelaku pasar. Pelaku pasar memiliki kecenderungan untuk menarik diri dari negara yang lebih mementingkan agenda politik daripada keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh oleh berbagai pihak (Gartzke et al., 2001). Perang dianggap dapat merusak prospek manfaat yang bisa diperoleh dan berpotensi menyebabkan kemunduran ekonomi negara.

Saat ini, terdapat berbagai metode yang digunakan untuk menilai tingkat interdependensi atau ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya.

Sejumlah pakar menggunakan pendekatan perbandingan aktivitas perdagangan, khususnya volume ekspor dan impor antara dua negara, kemudian dibandingkan dengan total ekspor dan impor dari negara tersebut secara keseluruhan. (Polachek, 1980). Jika persentase ekspor dan impor antara dua negara melebihi persentase total ekspor dan impor kedua negara tersebut ke seluruh dunia, dapat disimpulkan bahwa terjadi interdependensi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara tersebut saling membutuhkan dan menerima manfaat serta keuntungan yang signifikan dari hubungan ekonomi mereka.

Program ARISE+ Uni Eropa dan Indonesia adalah sebuah inisiatif yang menyoroti pentingnya konsep interdependensi dalam kerjasama antarnegara. Konsep interdependensi menekankan bahwa negara-negara saling terkait dan saling memengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berbicara mengenai Program ARISE+, konsep interdependensi ini menjadi landasan penting karena program ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara Uni Eropa dan Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi. Melalui kolaborasi yang erat, baik Uni Eropa maupun Indonesia saling mendukung dan memperkuat posisi satu sama lain dalam pasar global. Selain itu, program ini juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perdagangan dan investasi, sehingga interdependensi menjadi penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Dengan memahami dan menerapkan konsep interdependensi, Program ARISE Plus diharapkan dapat menciptakan

manfaat yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak serta mendorong integrasi ekonomi yang lebih kuat antara Uni Eropa dan Indonesia.

2. Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri atau bantuan asing pada umumnya dapat didefinisikan sebagai sumbangan dari negara-negara donor yang mencakup berbagai sumber daya seperti barang, keterampilan, pengetahuan teknis, serta dana hibah dan pinjaman dengan tujuan utama untuk mengatasi kebutuhan kemanusiaan dan mendukung pembangunan di negara penerima. Meskipun demikian, bantuan asing juga dapat memiliki motivasi politik dari negara donor atau penerima, bahkan bisa digunakan untuk mencapai tujuan militer. Dalam pengertian yang lebih spesifik, bantuan asing bisa dimaksudkan untuk menangani kebutuhan khusus suatu negara, seperti mengatasi kemiskinan dengan membantu masyarakat miskin dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi serta sosial di negara penerima (Riddle, 2007).

Alan Rix, dalam bukunya, menyebutkan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor kepada negara penerima tidak lepas dari motif yang dibawa oleh negara donor. Bantuan luar negeri dianggap sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara donor dari negara penerima bantuan (Rix, 1993). Sementara itu, Martinussen dan Pedersen menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan bentuk kerjasama pembangunan internasional yang melibatkan berbagai aktor yang memiliki tujuan, kepentingan, motif, dan strategi masing-masing. Perkembangan bantuan luar negeri dari waktu ke waktu telah mengalami transformasi, mulai dari

bantuan kemanusiaan, bantuan kerjasama, hingga bantuan kemitraan. Ini menandakan adanya perubahan yang cepat dalam strategi dan jenis bantuan yang diberikan (Martinussen & Pedersen, 2003).

Bantuan luar negeri dapat disalurkan langsung antara dua negara atau melalui perantara pihak ketiga. Pihak yang memberikan bantuan dan yang menerima bisa berasal dari negara-negara atau lembaga lain seperti NGO atau kelompok masyarakat tertentu di negara penerima. Sumber dana untuk bantuan luar negeri dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bantuan bilateral (*bilateral foreign aid*) dan multilateral (*multilateral foreign aid*) (Milner, 2007).

Martinussen dan Pedersen menjabarkan beberapa alasan dan tujuan yang dibawa oleh negara donor saat memberikan bantuan luar negeri kepada negara penerima. Mereka juga menyatakan bahwa motif dan kepentingan yang ada saling terkait dan tidak terpisah satu sama lain. Dalam konteks pemberian bantuan luar negeri, setiap negara donor membawa motif dan kepentingan yang beragam, serta variasi dalam bentuk bantuan yang diberikan. Martinussen dan Pedersen mengidentifikasi dua kategori motif bantuan luar negeri: motif yang terkait dengan tujuan dan kepentingan pembangunan, yang biasanya diumumkan secara publik, dan motif yang tidak berhubungan dengan pembangunan, yang merupakan motif asli dari negara donor dan sering kali dijaga kerahasiaannya. Motif yang terakhir ini cenderung mencakup kepentingan politik, keamanan negara, dan ekonomi (Martinussen & Pedersen, 2003). Martinussen dan Pedersen mengemukakan bahwa terdapat empat aspek utama dalam motif bantuan luar negeri, yaitu keamanan nasional dan politik,

ekonomi, lingkungan, serta moral dan kemanusiaan. Faktor-faktor ini sering menjadi pertimbangan bagi negara donor ketika memberikan bantuan luar negeri.

Terdapat empat bentuk utama bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor kepada negara penerima. Pertama, bantuan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara penerima. Bantuan ini dapat berupa hibah tanpa syarat, pinjaman lunak dengan suku bunga rendah atau jangka waktu pembayaran yang panjang, atau bantuan program yang disalurkan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur atau pendidikan. Kedua, bantuan militer, yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan militer negara penerima. Bantuan ini meliputi penjualan senjata dan peralatan militer, bantuan pelatihan militer, serta bantuan logistik untuk operasi militer. Ketiga, bantuan kemanusiaan, yang bertujuan untuk membantu negara penerima dalam mengatasi situasi darurat, seperti bencana alam atau konflik. Bantuan ini mencakup bantuan makanan dan minuman, bantuan medis, serta bantuan tempat tinggal sementara untuk korban bencana alam atau konflik. Keempat, bantuan teknis, yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan teknis negara penerima. Bantuan ini dapat berupa pengiriman tenaga ahli, pelatihan untuk personel negara penerima di negara donor, atau bantuan penelitian dan pengembangan di negara penerima. Bentuk bantuan luar negeri ini bervariasi tergantung pada kebutuhan dan situasi negara penerima, serta tujuan dan kebijakan luar negeri negara donor (Mshomba, 2009).

Program ARISE+ Indonesia yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dapat dikategorikan sebagai jenis bantuan luar negeri berupa hibah dan juga teknis. Program ini merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Indonesia untuk mengembangkan sektor ekonomi dan perdagangan melalui berbagai inisiatif, pelatihan, serta bantuan teknis. Melalui ARISE+ Indonesia, Uni Eropa berupaya meningkatkan kapasitas dan daya saing industri Indonesia, terutama dalam hal pemenuhan standar teknis dan peraturan perdagangan internasional. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

3. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional melibatkan subjek ekonomi dari satu negara yang berinteraksi dengan subjek ekonomi dari negara lain (Noussair et al., 2013). Terjadinya perdagangan internasional didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh masing-masing subjek ekonomi tersebut (Hasoloan, 2013). Subjek ekonomi ini dapat terdiri dari interaksi antara pemerintahan negara, individu dengan individu dari negara lain, atau pemerintah dengan individu dari negara lain. Motif di balik terjadinya perdagangan internasional adalah adanya perbedaan dalam potensi sumber daya dan tingkat teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara (Alon et al., 2014). Salah satu manfaat utama dari perdagangan internasional adalah terjadinya spesialisasi terhadap bidang produk tertentu yang menjadi ciri khas suatu negara (Vijayasri, 2013).

Perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan utama yang meliputi kontribusi dalam alokasi sumber daya secara efisien (Schumacher, 2013), merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dungey et al., 2018), dan diharapkan memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat (Salvatore, 2020). Konsep perdagangan internasional merujuk pada proses transaksi yang dilakukan tanpa paksaan dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga keduanya dapat merasakan manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut (Dietz, 2014). Perdagangan internasional terjadi karena terdapat kebutuhan di suatu negara yang tidak dapat terpenuhi dari hasil produksi dalam negeri. Tanpa adanya perdagangan internasional, negara tersebut harus mengandalkan produksi domestiknya untuk memenuhi segala kebutuhannya (Salvatore, 2020). Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, antara lain: kemajuan di bidang informasi dan transportasi, saling ketergantungan antarnegara, liberalisasi di sektor ekonomi, keberadaan keunggulan komparatif, serta upaya untuk meningkatkan devisa negara (Setiawan & Ridho, 2011).

Laju pertumbuhan perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal (Wang et al., 2016). Faktor internal dapat berupa faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Secara lebih spesifik beberapa faktor ekonomi yang menentukan perdagangan internasional, antara lain: tingkat inflasi, kurs nilai tukar, suku bunga, efektivitas pemerintahan, dan derajat keterbukaan.

Faktor pertama adalah inflasi, merupakan fenomena ekonomi dimana harga-harga secara umum mengalami peningkatan berkelanjutan dalam suatu negara

dalam periode waktu tertentu. Inflasi mengakibatkan daya beli mata uang negara tersebut menurun, sehingga masyarakat perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa. Faktor penyebab inflasi meliputi permintaan yang berlebihan, biaya produksi yang naik, kenaikan upah, dan fluktuasi harga internasional (Pujadi, 2022). Walaupun ada tingkat inflasi yang dianggap normal dalam ekonomi, kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen, mengganggu alokasi sumber daya, dan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan ekonomi (Salim et al., 2021). Selain itu, inflasi juga dapat mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter suatu negara, yang perlu dikelola dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Faktor kedua, nilai tukar mata uang atau kurs, merujuk pada perbandingan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (Salvatore, 2020). Perubahan nilai tukar mata uang ini memiliki dampak yang dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Apresiasi mata uang dapat berdampak negatif pada impor, sementara depresiasi mata uang dapat berdampak pada ekspor (Arize et al., 2000; Octavia & Wulandari, 2016). Faktor ketiga, tingkat suku bunga, juga memiliki pengaruh terhadap perdagangan internasional. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi ekspor suatu barang (Mahendra & Kesumajaya, 2015). Saat masyarakat memperoleh sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga yang rendah, hal ini dapat meningkatkan produksi barang dan pada gilirannya meningkatkan ekspor.

Efektivitas pemerintahan (*government effectiveness*) menunjukkan keberhasilan suatu pemerintahan dalam mencapai tujuan. Hal ini dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Tindakan pemerintah yang menggunakan pengeluaran tidak produktif yang didanai melalui pinjaman adalah contoh dari efektivitas pemerintahan (Baltas, 2013). Sementara itu, derajat keterbukaan (*trade openness*) merupakan indikator yang menunjukkan seberapa terbuka perekonomian suatu negara. Tingkat keterbukaan perdagangan ini dapat mendorong masuknya investasi asing ke suatu negara (Kariuki, 2015). *Trade openness* juga memiliki pengaruh terhadap perdagangan internasional. Semakin terbuka perekonomian suatu negara, semakin besar aktivitas perdagangan internasional yang terjadi (Alotaibi & Mishra, 2013).

Program ARISE+ antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan manifestasi nyata dari prinsip-prinsip perdagangan internasional yang dijelaskan oleh berbagai literatur ekonomi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perdagangan Indonesia dengan membantu penyesuaian standar, penguatan kebijakan perdagangan, dan peningkatan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global, terutama di Uni Eropa. Ini sesuai dengan pandangan Noussair et al. (2013) yang menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi karena adanya interaksi antara subjek ekonomi dari negara yang berbeda. Dalam konteks ARISE+, interaksi ini difasilitasi melalui kerja sama pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu komponen utama dari ARISE+ adalah harmonisasi standar dan regulasi yang memungkinkan produk-produk Indonesia memenuhi persyaratan pasar Uni Eropa. Hal ini mengurangi hambatan perdagangan dan membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia. Menurut Hasoloan (2013), perdagangan internasional terjadi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing subjek ekonomi, dan dalam hal ini, ARISE+ menyediakan kerangka kerja bagi kesepakatan tersebut, memastikan bahwa produk-produk yang diperdagangkan sesuai dengan standar yang disepakati kedua belah pihak.

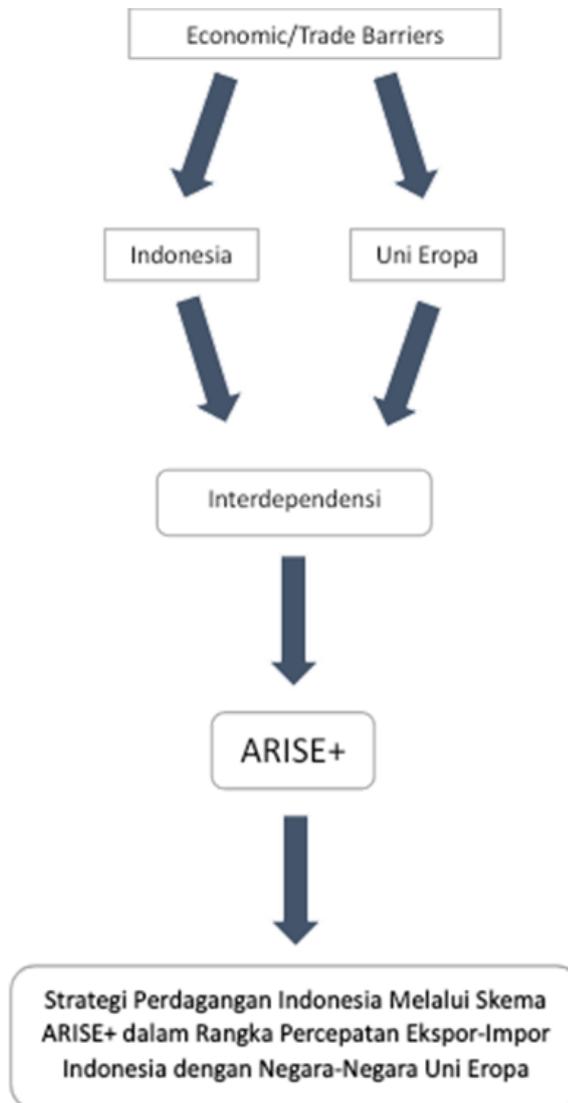
Selain itu, ARISE+ juga fokus pada peningkatan kapasitas teknologi dan pengetahuan di Indonesia melalui transfer teknologi dari Uni Eropa. Ini sejalan dengan pandangan Alon et al. (2014) bahwa salah satu motivasi utama perdagangan internasional adalah perbedaan dalam potensi sumber daya dan tingkat teknologi. Dengan memperkenalkan teknologi yang lebih maju dan praktik terbaik dari Uni Eropa, ARISE+ membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi di Indonesia, memungkinkan negara tersebut untuk bersaing lebih efektif di pasar global.

Program ini juga mendorong spesialisasi produk di Indonesia, sesuai dengan konsep spesialisasi yang dijelaskan oleh Vijayasri (2013). Dengan fokus pada produk-produk tertentu yang memiliki keunggulan komparatif, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing internasional. Misalnya, melalui ARISE+, sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur di Indonesia dapat mengembangkan produk-produk spesifik yang memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar Uni Eropa.

Program ARISE+ tidak hanya meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Dengan memfasilitasi interaksi ekonomi yang lebih erat dan mengurangi hambatan perdagangan, program ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional, di mana kerja sama dan saling mengisi antara negara-negara yang berbeda dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada yang bisa dicapai secara individu.

Gambaran singkat kerangka konseptual penelitian ini memberikan landasan yang jelas untuk memahami tujuan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Penulis menuangkan kerangka konseptual penelitian ini lewat sebuah bagan. Bagan tersebut menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama yang menjadi fokus penelitian, serta menjelaskan alur pemikiran yang digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut. Dengan melihat bagan, pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih baik tentang kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian, yang pada gilirannya membantu dalam memahami cara penelitian tersebut diarahkan dan hasil yang diharapkan. Melalui visualisasi bagan, kompleksitas konsep-konsep dapat disederhanakan menjadi struktur yang lebih mudah dipahami, memudahkan pembaca untuk mengikuti dan menganalisis argumentasi penelitian dengan lebih baik. Gambaran singkat kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual



(Sumber : diolah oleh penulis)

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dan mencakup beberapa dimensi. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kerjasama Indonesia-Uni Eropa melalui *ASEAN Regional Integration Support-Indonesia Trade Support Facility* (ARISE+ Indonesia). Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara rinci motivasi, dampak, kontribusi, hambatan serta tantangan yang terjadi antara kedua pihak yang bermitra.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data akan dikumpulkan melalui sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, dan publikasi terkait Strategi perdagangan Indonesia melalui skema ARISE+ dalam rangka percepatan ekspor-impor Indonesia dengan Uni Eropa. Melalui studi pustaka, peneliti akan mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam tentang topik penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, literatur, dokumen, jurnal, artikel surat kabar, dan informasi yang diakses melalui internet yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis yakni analisis data kualitatif. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya akan dianalisis lebih lanjut dengan cara penggambaran masalah yang ada kemudian dianalisis dengan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

5. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penulisan deduktif, di mana fokusnya adalah menggambarkan permasalahan secara umum, kemudian menarik kesimpulan secara khusus melalui analisis data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan mencerminkan masalah yang ada dalam rumusan masalah penelitian. Data ini kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang merangkum masalah-masalah yang teridentifikasi dalam rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengkaji dan membahas masalah dalam penelitian ini, penulis membutuhkan landasan teori yang kokoh untuk mendukungnya. Teori dan konsep terkait akan digunakan sebagai alat analisis dalam menjelaskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Konsep dan teori tersebut akan diperoleh dari jurnal, artikel, berita *online* dan *offline*, serta buku referensi yang relevan. Beberapa konsep dan teori yang menjadi dasar penulisan ini mencakup Interdependensi, bantuan luar negeri, dan perdagangan internasional.

A. Konsep Interdependensi

Salah satu konsep utama yang dapat dipakai untuk menggambarkan sifat sistem internasional saat ini adalah konsep interdependensi. Konsep ini menyatakan bahwa negara bukan merupakan aktor independen secara keseluruhan, justru negara saling bergantung satu dengan yang lainnya. Tidak ada suatu negara pun yang secara keseluruhan dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, masing-masing bergantung pada sumberdaya dan produk dari negara lainnya.

Interdependensi sebenarnya merupakan turunan dari perspektif liberalisme yang terdapat dalam studi Hubungan Internasional. Liberalisme interdependensi memiliki asumsi bahwa modernisasi akan meningkatkan tingkat interdependensi antar negara. Aktor transnasional menjadi semakin penting, kekuatan militer merupakan instrumen yang tidak absolut dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Interdependensi kompleks akan menciptakan dunia hubungan internasional yang jauh lebih kooperatif (Perwita & Yani, 2005, p. 78).

Saling ketergantungan (interdependensi) dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik dan sosial. Dalam interdependensi, terdapat setidaknya beberapa sektor ekonomi dan politik dalam hubungan interdependensi antar negara, yaitu sektor perdagangan, investasi, finansial dan politik. Sektor Perdagangan; merupakan sektor penting dalam memahami ketergantungan ekonomi. Hubungan ekonomi melalui perdagangan dapat berubah dan perubahan tersebut dapat mempengaruhi interdependensi. Transaksi perdagangan memiliki implikasi besar terhadap interdependensi dibandingkan dengan transaksi internasional yang melibatkan pertukaran informasi antar pemerintah. Antar negara akan terjadi mutual dependent dalam hal barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh mereka sendiri.

Sektor investasi; kenaikan pertaruhan atau resiko aktor-aktor interdependensi akan mengalami kecenderungan untuk semakin tinggi yang disebabkan oleh berubahnya pola investasi. Perubahan ini terutama terjadi pada investasi langsung dalam bentuk kepemilikan saham. Konsekuensinya yaitu diperlukan adanya peningkatan kendali dan keterlibatan investor secara langsung dalam pengelolaan investasinya. Sektor finansial; nilai tukar uang yang menjadi sangat vital dalam hubungan interdependensi. Perubahan-perubahan dalam operasi keuangan telah meningkatkan hubungan interdependensi. Negara yang mata uangnya menjadi media pertukaran berupaya untuk mendisiplinkan kebijakan keuangannya. Sedangkan negara lain mencoba untuk tidak membiarkan mata uangnya merosot di bawah nilai tukar internasional. Sektor politik; terdapat suatu kesadaran bahwa suatu negara tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya secara

mandiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Kerjasama antar negara ini akan dapat saling melengkapi kekurangan dari masing-masing negara.

Dalam interdependensi, keberhasilan suatu negara dalam bekerjasama berpijak pada dua hal, yakni *power*, kemampuan tawar-menawar dan rezim internasional. *Power* dan kemampuan tawar-menawar terutama berkaitan dengan kondisi interdependensi yang asimetris. Hal ini dikarenakan meski dalam teorinya hubungan interdependensi mengarahkan pada suatu hubungan yang timbal balik, namun dalam kenyataannya hubungan yang simetris tersebut jarang terjadi. Karena itu *power* aktor dalam hubungan interdependensi akan beragam sesuai dengan isunya. Kemudian, rezim internasional akan bertumpu pada saling ketergantungan asimetris yang menyediakan setiap pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonomi-politiknya dalam mencapai kesepakatan antar mereka.

Program ARISE+ Indonesia menciptakan interdependensi yang signifikan antara Indonesia dan Uni Eropa melalui inisiatif yang berfokus pada peningkatan perdagangan dan pengembangan kapasitas. Dengan mendukung adaptasi regulasi dan standar produk Indonesia agar sesuai dengan Uni Eropa, ARISE+ memfasilitasi akses produk Indonesia ke pasar Eropa, yang menciptakan ketergantungan timbal balik di mana Indonesia memperoleh akses pasar dan teknologi, sementara Uni Eropa mendapatkan diversifikasi sumber daya dan pasokan komoditas penting seperti kelapa sawit dan ikan tuna. Interdependensi ini diperkuat melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi eksportir Indonesia, yang meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa dan memperkuat daya saing di pasar internasional. Dukungan teknis dan peningkatan

kapasitas produksi yang diberikan oleh ARISE+ menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, yang pada gilirannya mendukung industri Uni Eropa dengan pasokan produk berkualitas tinggi. Kerjasama ini mencerminkan interdependensi yang mendalam, di mana keberhasilan ekonomi satu pihak berdampak positif pada pihak lainnya, menciptakan siklus kemitraan yang saling menguntungkan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan bagi kedua wilayah.

Interdependensi mengacu pada saling ketergantungan antara dua atau lebih entitas dalam aspek perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ARISE+ Indonesia, terlihat adanya hubungan interdependensi yang kuat antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa, sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, berupaya meningkatkan standar produk dan regulasi di Indonesia agar sesuai dengan standar internasional, khususnya yang diterapkan di Uni Eropa.

Uni Eropa sebagai salah satu blok ekonomi terbesar di dunia memiliki kepentingan besar dalam menjaga akses ke pasar-pasar yang dinamis seperti Indonesia. Melalui program ARISE+ Indonesia, Uni Eropa berusaha memastikan bahwa Indonesia mengadopsi standar-standar perdagangan yang kompatibel dengan aturan dan regulasi Uni Eropa. Hal ini penting karena memungkinkan Uni Eropa untuk memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan standar tinggi mereka dari Indonesia, yang pada gilirannya memastikan kelancaran perdagangan dan keamanan konsumen di Eropa. Ketergantungan ini bersifat timbal balik; Uni Eropa mengandalkan pasokan dari Indonesia, sementara Indonesia memerlukan akses pasar Eropa untuk ekspor produknya. Ketergantungan ini bersifat timbal balik, di

mana kemajuan dalam satu sisi akan memberikan dampak positif pada sisi yang lain.

Program ARISE+ Indonesia juga menunjukkan aspek interdependensi kelembagaan. Program ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta lembaga terkait lainnya, yang bekerja sama dengan entitas Uni Eropa untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas mereka. Dalam proses ini, lembaga-lembaga di Indonesia bergantung pada dukungan teknis dan finansial dari Uni Eropa untuk mengimplementasikan reformasi yang diperlukan, sementara Uni Eropa bergantung pada kerja sama yang efektif dari pihak Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mendukung tujuan bersama. Hubungan ini menunjukkan adanya ketergantungan yang bersifat simbiosis antara kedua belah pihak dalam mencapai tujuan yang lebih luas dalam konteks integrasi perdagangan global.

Lebih jauh lagi, program ARISE+ Indonesia memperlihatkan interdependensi dalam pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan perdagangan yang kompatibel dengan standar Uni Eropa memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan prosedur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di Indonesia dapat mempengaruhi hubungan dagang dengan Uni Eropa, dan sebaliknya, kebijakan Uni Eropa juga akan mempengaruhi cara Indonesia mengatur perdagangan internasionalnya. Interdependensi ini menuntut adanya dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan antara kedua belah pihak untuk

memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat menguntungkan kedua belah pihak secara seimbang.

Dalam keseluruhan implementasi program ARISE+ Indonesia, Uni Eropa secara aktif terlibat dalam proses yang menunjukkan adanya interdependensi yang kompleks dan mendalam. Uni Eropa tidak hanya berperan sebagai donor atau mitra dagang, tetapi juga sebagai entitas yang sangat bergantung pada keberhasilan program ini untuk mencapai tujuan strategisnya sendiri. Interdependensi ini mencerminkan hubungan simbiosis antara Uni Eropa dan Indonesia, di mana keberhasilan satu pihak sangat terkait dengan kesuksesan pihak lainnya. Ini menunjukkan bagaimana interdependensi menjadi landasan bagi hubungan internasional yang lebih erat dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia.

B. Konsep Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Fenomena pemberian bantuan luar negeri atau foreign aid bukan merupakan suatu isu baru dalam studi hubungan internasional. Dalam diskursus terkait foreign aid atau bantuan luar negeri, fokus analisis ditempatkan pada interaksi atau hubungan antara dua aktor utama, yaitu donor dan juga resipien. Aktor donor dalam diskursus bantuan luar negeri yang dimaksud tersebut adalah negara maupun organisasi internasional. Bantuan luar negeri kemudian dipandang sebagai sebuah strategi atau upaya untuk memaksimalkan upaya masing-masing aktor dalam mencapai kepentingannya (Virgianita et al., 2014).

Ditinjau dari sejarahnya, bentuk paling awal dalam fenomena pemberian bantuan luar negeri adalah bantuan militer. Berakhirnya perang dunia 2 merupakan

titik awal dimulainya bantuan ekonomi, yaitu dengan dicetuskannya *Marshall Plan* oleh Amerika Serikat yang merupakan bentuk bantuan untuk rehabilitasi negara-negara Eropa Barat dan Selatan. Setelah bantuan ini dianggap berhasil, kemudian muncul sebuah komitmen bersama yang ditujukan untuk negara-negara dunia ketiga saat itu yang dikenal dengan *Colombo Plan*. Hal ini menandakan adanya pergeseran konsentrasi kawasan untuk bantuan luar negeri saat itu, dari Eropa Barat ke negara-negara Asia dan juga Amerika Latin (Hunt, 2012, p. 80). Sejak saat itu implementasi bantuan luar negeri terus mengalami peningkatan dan perluasan isu sehingga menempatkan bantuan luar negeri sebagai salah satu isu yang signifikan dalam kajian hubungan internasional.

Dalam membahas fenomena bantuan luar negeri, seringkali ditemui tumpang tindih dan perbedaan dalam usaha untuk sekedar mendefinisikannya. Bantuan luar negeri kerap diartikan sebagai istilah halus untuk menyebut utang luar negeri, walaupun penyamaan seperti itu sama sekali tidak tepat. Bantuan luar negeri bukan utang dalam arti sempit, karena tidak semua bantuan luar negeri diberikan dalam bentuk utang luar negeri (Rosyidin, 2022, p. 12).

Robert Gilpin (1987, p. 311) mendefinisikan bantuan luar negeri secara sempit yaitu sebagai “sejumlah dana yang diberikan dari negara yang relatif kaya atau maju kepada negara berkembang”. Senada dengan definisi ini, K.J Holsti (1995) mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai “pemberian uang atau dana, transfer teknologi dan juga bantuan teknis dari negara donor ke negara penerima”. Sedangkan Riddell (2007) berpendapat bahwa “bantuan luar negeri terdiri dari semua sumber daya, termasuk barang, keterampilan dan pengetahuan teknis, dana

hibah (hadiah), atau pinjaman yang ditransfer oleh donor ke penerima”. Sementara itu Carol Lancaster dan Ann Van Dusen (2005, p. 6) menawarkan definisi yang lebih komprehensif, yaitu: “bantuan luar negeri sebagai transfer sumber daya pemerintah secara sukarela dari satu pemerintah kepada pemerintah lain, organisasi internasional, atau organisasi non-pemerintah (termasuk organisasi nirlaba yang bekerja dalam isu-isu tertentu, organisasi masyarakat, gereja dan organisasi sejenisnya, universitas, yayasan, bahkan perusahaan yang berorientasi bisnis) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara penerima, di antara tujuan-tujuan lainnya”.

Bantuan ini dapat berupa hibah tunai, pinjaman lunak, penghapusan atau keringanan utang, atau dalam bentuk komoditas seperti makanan atau obat-obatan. Bantuan ini dapat mendanai proyek-proyek terpisah, seperti pembangunan jalan, membiayai penelitian, bantuan teknis dan pelatihan bagi individu di negara penerima, atau dapat diberikan sebagai insentif bagi penerima untuk mengadopsi kebijakan yang dikehendaki oleh donor (Lancaster & Dusen, 2005).

Dalam tulisannya yang berjudul ‘*A Political Theory of Foreign Aid*’, Hans Morgenthau (1962) mengklasifikasikan enam jenis bantuan luar negeri, yaitu bantuan kemanusiaan, bantuan subsidi, bantuan militer, suap, bantuan untuk prestise, dan bantuan untuk pembangunan ekonomi. Dari keenam jenis bantuan tersebut, hanya bantuan kemanusiaan yang bersifat non-politis. Bantuan kemanusiaan ini ditujukan kepada negara yang dilanda bencana alam, seperti gempa bumi, kelaparan, hingga negara yang terjangkit suatu wabah. Walaupun bersifat non politis, bantuan kemanusiaan dapat memiliki fungsi politik ketika

berada dalam konteks politik. Menurut Rosyidin (2022), Klasifikasi bantuan luar negeri yang ditawarkan oleh Morgenthau tersebut terlalu eksklusif karena hanya menekankan tujuan negara donor pada aspek politik. Padahal, pada kenyataannya terdapat banyak sekali tujuan dari bantuan luar negeri yang sifatnya non-politis.

Dalam diskursus bantuan luar negeri, terdapat tiga jenis bantuan yang paling umum, antara lain *Official Development Assistance (ODA)*, *Official Assistance (OA)*, dan bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*). Klasifikasi ini didasarkan pada empat aspek yakni pihak pemberi bantuan (donor), pihak penerima bantuan (*recipient*), tujuan bantuan, dan dimensi kehidupan yang melatarbelakanginya (Rosyidin, 2022). Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendefinisikan ODA sebagai bantuan pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk kesejahteraan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Dalam pemberian bantuan, ODA berfokus pada bidang yang menunjang pembangunan negara, pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengurangan pengangguran, membangun infrastruktur, dan mendukung tata pemerintahan yang baik (*good governance*). ODA juga tidak mengalokasikan dana bantuan untuk bidang-bidang di luar pembangunan seperti bantuan dalam bidang militer, pemeliharaan perdamaian, energi nuklir, dan program-program kebudayaan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2017).

Distribusi bantuan luar negeri dapat diberikan melalui dua jalur, yaitu secara bilateral dan multilateral. Bantuan bilateral merupakan bantuan luar negeri yang diberikan secara langsung kepada negara penerima. Sedangkan bantuan multilateral adalah bentuk bantuan yang menempatkan lembaga bantuan internasional sebagai

hub antar negara donor dengan penerima. Contoh bantuan bilateral adalah bantuan yang secara umum diberikan negara melalui lembaga bantuan luar negeri suatu negara, seperti USAID (Amerika Serikat), AusAid (Australia), JICA (Jepang), SIDA (Swedia), dan lain sebagainya. Sedangkan, bantuan multilateral diberikan melalui lembaga penyalur bantuan yang berperan sebagai perantara seperti Asian Development Bank (ADB) dan PBB.

Program ARISE+ Indonesia masuk dalam kategori hibah berjenis bilateral karena melibatkan dua pihak utama, yaitu Uni Eropa dan Indonesia. Meskipun Uni Eropa terdiri dari banyak negara anggota, program ini tetap dianggap bilateral karena keterlibatan langsung antara Uni Eropa sebagai satu kesatuan dengan Indonesia. Karena itu, program ini tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai multilateral, di mana partisipasi melibatkan lebih dari dua pihak atau lebih dari satu kesatuan politik seperti organisasi internasional. Jika mengacu pada konteks, meskipun Uni Eropa memiliki banyak negara anggota, ia bertindak sebagai satu entitas tunggal dalam kaitannya dengan program ARISE Plus Indonesia, membuatnya masuk ke dalam kategori bilateral. Hal ini menegaskan bahwa hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia dalam kerangka program ini lebih bersifat langsung dan terfokus.

C. Konsep Perdagangan Internasional (*International Trade*)

Perdagangan internasional adalah bagian dari makroekonomi yang melibatkan perekonomian terbuka, yang artinya perekonomian tersebut berhubungan dan berinteraksi dengan perekonomian negara lain secara bebas. (Mankiw et al., 2014). Perdagangan internasional melibatkan ekspor barang dari

suatu negara ke luar negeri, sementara barang-barang tertentu untuk konsumsi atau investasi diimpor dari negara lain.

Menurut Rosihan et al. (2014, p. 4), perdagangan internasional didefinisikan sebagai aktivitas perdagangan yang menciptakan hubungan dan ketergantungan antara dua negara atau lebih, yang memiliki perbedaan dalam hal sumber daya alam dan tenaga kerja. Di negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan ekspor menyediakan peluang kerja dan menghasilkan devisa yang dapat digunakan untuk membeli berbagai komoditas asing. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan memproduksi sendiri barang-barang tersebut karena memerlukan teknologi canggih yang belum tersedia di pasar domestik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, pasal 1 ayat (3) tentang perdagangan, perdagangan luar negeri adalah aktivitas perdagangan yang mencakup kegiatan usaha impor dan ekspor barang dan jasa yang melintasi perbatasan dan wilayah antar negara .

Menurut Sadorno Sukirno (2012), perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat, antara lain memungkinkan negara memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri karena perbedaan kondisi geografis, iklim, dan tingkat penguasaan teknologi. Perdagangan ini juga memungkinkan negara memperoleh keuntungan dari spesialisasi, di mana walaupun bisa memproduksi barang yang sama, terkadang lebih efisien untuk mengimpor. Selain itu, perdagangan internasional membantu pengusaha mengoperasikan mesin produksi secara maksimal tanpa khawatir kelebihan produksi yang bisa menurunkan harga, serta memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Terakhir, perdagangan

internasional memungkinkan transfer teknologi modern dan teknik manajemen yang lebih efisien.

Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian global, terutama di era globalisasi saat ini. Namun, aktivitas perdagangan ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang dapat menghalangi arus barang dan jasa antar negara. Dalam perdagangan internasional, hambatan perdagangan (*trade barriers*) dibagi menjadi hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Kendala-kendala ini seringkali menyulitkan negara pengekspor dalam mengirim barang ke negara tujuan, terutama ke negara maju yang memiliki persyaratan sangat ketat. Sejak pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995, WTO telah berupaya meliberalisasi perdagangan dengan mengurangi tarif, bahkan hingga 0%. Namun, hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan hambatan perdagangan dan tidak menjamin kelancaran arus barang antar negara. Secara umum, hambatan perdagangan diartikan sebagai tindakan yang mempengaruhi dan membatasi pergerakan bebas barang dan jasa dalam perdagangan internasional.

Pembatasan tarif dalam perdagangan menyebabkan banyak negara menerapkan kebijakan non-tarif. Beberapa ekonom berpendapat bahwa perdagangan barang dan jasa antar negara seharusnya bebas, dengan tarif serendah mungkin dan hambatan non-tarif minimal. Pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa perdagangan bebas memberikan manfaat lebih besar dan meningkatkan kemakmuran negara dan dunia secara keseluruhan. Salah satu sektor perdagangan internasional Indonesia yang terkena dampak kebijakan tarif dan non-tarif adalah sektor perikanan dan kelautan. Pengembangan sektor perikanan Indonesia memiliki

prospek yang baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan devisa melalui ekspor hasil laut. Udang dan tuna merupakan contoh produk perikanan Indonesia yang memberikan banyak devisa dalam perdagangan internasional. Pengembangan industri hasil laut Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan devisa negara melalui ekspor. Udang dan tuna adalah hasil laut penting yang diekspor dalam jumlah besar ke luar negeri, menghasilkan devisa yang signifikan.

1. Ekspor dan Impor

Perdagangan internasional, sebagai aktivitas ekonomi yang vital, terbagi menjadi dua aspek utama: ekspor dan impor. Kegiatan ekspor merujuk pada proses perdagangan yang melibatkan pengiriman barang dari suatu negara ke negara lain dengan mematuhi aturan yang berlaku. Ekspor merupakan total penjualan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain dalam suatu periode waktu tertentu, termasuk juga layanan asuransi (Utomo, 1999, p. 6). Salah satu peran krusial dari ekspor dalam perdagangan internasional adalah memberikan keuntungan bagi negara serta meningkatkan pendapatan nasional, yang juga akan menggalakkan peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat produksi yang lebih tinggi, siklus kemiskinan dapat diputuskan dan proses pembangunan ekonomi dapat dipercepat.

Ekspor juga dapat didefinisikan sebagai penjualan barang ke luar negeri dengan memanfaatkan kualitas, sistem pembayaran dan ketentuan perdagangan lainnya yang telah memiliki persetujuan oleh eksportir dan importir (Sukirno, 2010). Sukirno menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi tingkat

ekspor suatu negara, yaitu tingkat daya saing dan keadaan ekonomi di negara lain, kebijakan impor dari negara lain yang dapat memengaruhi ekspor, dan nilai mata uang/valuta asing.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor suatu negara berasal dari dalam negeri (internal) dan luar negeri (eksternal). Menurut Sukirno (2012, p. 205) dan Mankiw (2012, p. 377), faktor-faktor tersebut meliputi kemampuan produksi dan harga barang ekspor, preferensi konsumen luar negeri, nilai tukar mata uang, pendapatan masyarakat, biaya pengiriman barang, serta kebijakan perdagangan pemerintah.

Sementara itu bagian yang tidak boleh dipisahkan dari ekspor adalah impor. Menurut Susilo (2008, p. 101), impor dapat didefinisikan sebagai tindakan mengimpor barang dari suatu negara ke wilayah administrasi bea masuk negara lain. Definisi ini menunjukkan bahwa impor melibatkan interaksi antara dua negara, diwakili oleh perusahaan dari masing-masing negara yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Transaksi impor, sebagaimana disebutkan oleh Tandjung (2011, p. 139), merupakan proses perdagangan di mana barang dari luar negeri dimasukkan ke wilayah administrasi bea masuk Indonesia, dengan mematuhi regulasi yang berlaku.

Purnamawati dan Fatmawati (2013, p. 13) menjelaskan bahwa impor merupakan pembelian barang dari luar negeri yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang asing. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa impor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang

melibatkan proses pengiriman barang ke wilayah administrasi bea masuk Indonesia, yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang aktif dalam bidang ekspor-impor, dengan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran bea masuk.

Impor memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan internasional, karena membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang yang tidak diproduksi secara lokal atau tidak mencukupi. Produk impor sering kali merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau barang-barang yang diproduksi di dalam negeri namun tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, impor tidak hanya sebagai proses pengadaan barang dari luar negeri, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem perdagangan global yang memungkinkan aliran barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui proses impor, negara dapat memperluas pilihan barang yang tersedia bagi konsumen, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, ekspor dan impor, terkadang menemui hambatan (*trade barriers*). Dominick Salvatore (*International Economics: Trade and Finance*, 2013) menguraikannya dalam dua bentuk :

- a. Hambatan Tarif, adalah salah satu instrumen kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional dengan membebankan pajak atau cukai atas barang yang melintasi daerah

pabean. Tarif, sebagai kebijakan perdagangan tertua, telah digunakan secara tradisional untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan memproteksi produk dalam negeri. Pengeunaan tarif menyebabkan harga barang impor meningkat dalam mata uang nasional, sehingga permintaan barang impor menurun dan mendorong produksi domestik. Jenis-jenis tarif yang umum digunakan meliputi bea ekspor (pajak atas barang yang diekspor), bea transit (pajak atas barang yang melintasi suatu negara menuju negara lain), dan bea impor (pajak atas barang yang masuk ke suatu negara sebagai tujuan akhir).

b. Hambatan non-tarif, yang terdiri dari :

- 1) Kuota Impor, untuk melindungi industri dalam negeri kuota impor ini memiliki peran penting. Secara tidak langsung kuota impor juga berperan untuk membatasi kegiatan impor pada tingkat tertentu.
- 2) Pembatasan ekspor sukarela, yakni ketika negara pembeli menekan negara pengekspor untuk mengurangi ekspor suatu komoditas secara sukarela dengan mengancam penerapan hambatan perdagangan yang lebih serius. Tindakan ini dilakukan jika ekspor komoditas tersebut dianggap mengganggu atau mengancam industri dalam negeri secara keseluruhan.
- 3) Embargo ekonomi, larangan resmi yang diberlakukan oleh satu negara atau sekelompok negara terhadap negara lain untuk membatasi atau sepenuhnya menghentikan perdagangan barang, jasa, dan kadang-kadang aset keuangan. Tujuan utama dari embargo

ekonomi adalah untuk memaksa perubahan kebijakan atau perilaku pemerintah target dengan cara melemahkan ekonominya. Embargo sering digunakan sebagai alat politik atau diplomatik untuk menekan negara target terkait isu-isu seperti pelanggaran hak asasi manusia, agresi militer, atau pengembangan senjata nuklir.

- 4) Kartel internasional, dijelaskan sebagai suatu entitas yang beroperasi di berbagai negara dan terdiri dari para produsen komoditas atau serangkaian pemerintah yang bekerja sama untuk membatasi produksi dan ekspor komoditas tertentu, dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan keseluruhan bagi entitas tersebut.
- 5) *Dumping*, praktik di mana suatu perusahaan atau negara mengekspor barang ke pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga domestik atau di bawah biaya produksi. Tujuan dari *dumping* sering kali adalah untuk memperoleh pangsa pasar dengan cepat, mengeliminasi persaingan, atau memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi. Meskipun dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi konsumen di negara impor melalui harga yang lebih murah, *dumping* dapat merugikan produsen lokal yang tidak mampu bersaing dengan harga rendah tersebut, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi dan pengangguran.

Perdagangan internasional di era globalisasi ini juga dihadapkan pada adanya kebijakan non-tarif yang semakin banyak diterapkan. Menurut UNCTAD, kebijakan *non-tariff measure* (NTM) adalah kebijakan selain tarif, yang berpotensi

berdampak ekonomi pada perdagangan barang internasional, mengubah kuantitas yang diperdagangkan, atau harga, atau keduanya. Sejauh ini jumlah tindakan NTM terbanyak pada jenis *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT) (UNCTAD, 2016). TBT dan SPS adalah dua jenis regulasi perdagangan yang bertujuan melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan, serta memastikan kualitas produk di pasar domestik.

Technical Barriers to Trade (TBT) mencakup regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian yang dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional, seperti ukuran, bentuk, desain, fungsi, atau kinerja produk, serta aspek pengemasan, penandaan, dan pelabelan. Tujuan utama dari TBT adalah untuk memastikan keamanan dan perlindungan konsumen, menjaga lingkungan, serta mendukung efisiensi pasar dengan memastikan bahwa produk yang beredar aman dan berkualitas. Contoh dari TBT meliputi regulasi tentang pelabelan makanan, standar keselamatan untuk peralatan elektronik, dan persyaratan teknis terkait emisi kendaraan. Di sisi lain, *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) berfokus pada perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dari risiko yang berkaitan dengan pangan, hewan, dan produk tumbuhan, termasuk upaya pencegahan penyebaran penyakit dan hama. SPS melibatkan tindakan seperti inspeksi, karantina, dan pengaturan tingkat residu pestisida dalam makanan. Meskipun kedua jenis regulasi ini penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan publik, mereka dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional jika tidak diterapkan dengan proporsional dan transparan.

Tingginya penerapan kebijakan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT) pada produk-produk pertanian seperti sayuran, produk hewani, dan makanan olahan disebabkan oleh potensi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Namun, kebijakan non-tarif ini seringkali menjadi perhatian bagi negara-negara eksportir. Peningkatan penerapan kebijakan non-tarif oleh negara-negara importir menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama bagi negara-negara berkembang. Kebijakan non-tarif tersebut dapat menghambat perdagangan internasional dan membatasi akses pasar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

2. Teori-Teori Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik mencakup teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif, sementara teori modern dituangkan dalam teori Heckscher-Ohlin.

a. Teori Keunggulan Absolut

Teori perdagangan berdasarkan keunggulan absolut pertama kali dicetuskan oleh seorang ekonom terkenal bernama Adam Smith dalam karyanya yang terkenal, "*The Wealth of Nations*" (1776). Dalam karyanya tersebut, Smith mengemukakan konsep bahwa negara-negara seharusnya memproduksi dan melakukan perdagangan dengan barang-barang di mana mereka memiliki keunggulan absolut dalam produksi. Menurut teori ini, jika satu negara, misalnya negara A, sangat efisien dalam memproduksi satu

jenis komoditas dibandingkan dengan negara lain, namun kurang efisien dalam memproduksi jenis komoditas yang lain, maka negara-negara tersebut akan saling bekerjasama untuk memproduksi komoditas sesuai dengan keunggulan absolutnya. Mereka akan melakukan pertukaran hasil produksi untuk komoditas yang mereka kurang efisien dalam memproduksinya, dengan negara-negara lain yang memiliki keunggulan dalam hal tersebut.

Adam Smith berpendapat bahwa perdagangan bebas akan memberikan manfaat bagi semua negara dan mengusulkan kebijakan *laissez-faire*, yakni mengurangi campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Perdagangan bebas juga dianggap dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dunia dan meningkatkan kesejahteraan global (Salvatore, 2013, p. 34).

b. Teori Keunggulan Komparatif

Pada tahun 1817, David Ricardo menerbitkan sebuah buku yang berjudul "*Principles of Political Economy and Taxation*". Buku tersebut secara spesifik membahas tentang teori keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa jika suatu negara kurang efisien atau memiliki kelemahan absolut dalam memproduksi kedua komoditas dibandingkan negara lain, negara tersebut akan memusatkan perhatiannya pada produksi dan ekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut yang lebih kecil, sementara mengimpor komoditas dengan kerugian absolut yang lebih tinggi. Perdagangan internasional juga dipandang dapat meningkatkan

produksi global dengan memungkinkan setiap negara memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Suatu negara dianggap memiliki keunggulan komparatif jika biaya pengorbanannya dalam proses produksi lebih rendah dibandingkan dengan negara lain (Krugman et al., 2018, p. 54).

Pada tahun 1936, Haberler menguraikan teori keunggulan komparatif dengan menggunakan konsep biaya oportunitas. Menurut konsep ini, biaya suatu komoditas adalah produksi satu unit tambahan dari komoditas pertama yang mengorbankan sejumlah sumber daya dari produksi komoditas kedua. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam suatu komoditas jika biaya kesempatan produksi komoditas tersebut lebih rendah dibandingkan dengan komoditas lainnya, dan sebaliknya memiliki kelemahan komparatif dalam komoditas yang lain (Salvatore, 2013, p. 36)

c. Teori Modern (*Heckscher-Ohlin Theory*)

Teori *Heckscher-Ohlin*, atau dikenal juga sebagai Teori H-O, diperkenalkan pertama kali oleh Eli Heckscher dan muridnya, Bertil Ohlin. Teori ini menjelaskan bahwa pola perdagangan suatu negara cenderung didasarkan pada ekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Dalam teori ini diasumsikan bahwa negara akan cenderung mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan murah. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang yang memanfaatkan faktor produksi yang relatif langka dan mahal. Dengan demikian, teori ini

memberikan pemahaman tentang bagaimana perdagangan internasional terjadi, yaitu dengan negara-negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah secara relative (Krugman et al., 2018, p. 115).